

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4)
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**HASNA NABILA RAHMAN
145010100111121**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

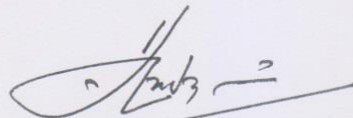
SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4)
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

HASNA NABILA RAHMAN
NIM : 145010100111121

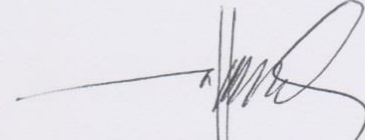
Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 April
2018 dan disahkan pada tanggal: 18 April 2018

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS.
NIP. 19500815 197903 1 002

Pembimbing Pendamping,



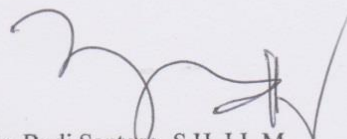
M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.
NIP. 19800419 200812 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M
NIP. 19720622 200501 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Hasna Nabila Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 24 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Raya Tlogo III Nomor 10 Kab.
Blitar
No Telpon : 081333953015
Email : nabilahasna2410@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Kepanjen Lor 2 Kota Blitar : Tahun 2003-2008
2. SMPN 2 Kota Blitar : Tahun 2008-2011
3. MAN 2 Kota Malang : Tahun 2011-2014
4. S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya : Tahun 2014-2018



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 229/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : HASNA NABILA RAHMAN
NIM : 145010100111121
Judul : TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4)
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: Hasna Nabila Rahman
Tempat, Tanggal Lahir	: Blitar, 24 Oktober 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Jalan Raya Tlogo III Nomor 10 Blitar
No Telpn	: 081333953015
Email	: nabilahasna2410@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Kepanjenlor 2 Blitar : Tahun 2003-2008
2. SMPN 2 Kota Blitar : Tahun 2008-2011
3. MAN 2 Kota Malang : Tahun 2011-2014
4. S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya : Tahun 2014-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat sampai pada tahap terakhir perkuliahan Strata Satu saya, terkhusus pada selesainya skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS MENURUT PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4) PERATURAN MENTERI ATR/KBPN NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”**. Penulis menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan support selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Rachamad Safa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Budi Santoso, S.H. LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Prof.Dr. Moh. Bakri SH., MS. selaku dosen Pembimbing saya. Serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan saya ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
4. M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn., selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih karena sudah banyak saya reportkan selama menjadi dosen pembimbing saya.
5. Rumi Suwardiyati S.H., M.Kn., selaku dosen mata kuliah metode penelitian penulis, dosen pendamping yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini disamping kedua dosen pembimbing penulis.
6. Fatchur Rohman. dan Faiqotul Himah selaku kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yang memberikan saya dukungan dukungan materiil maupun non materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Hasna Anita Rahman dan Adam Nauvaldi Rahman selaku kedua adik saya yang sangat saya sayangi, terimakasih sudah selalu memberi semangat penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Afandy Kurniawan selaku lelaki akrab dalam hidup saya selama lebih dari satu tahun ini yang selalu memberi saya motivasi dan selalu mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kamu dipermudahkan jalannya untuk segera meraih masa depanmu.
9. Firda Ammarida Harum, Umi Sholihah, dan Agrery Ayu Nadia selaku teman kos penulis yang selalu berbesar hati untuk mendengarkan keluh kesah penulis, yang telah menjadi saudara penulis selama diperantauan.
10. Aprilalili Ayatri, Nandaini Intan, Indah Diana, Suryani Minangsari, selaku teman sedari mahasiswa baru penulis yang selalu mendukung apapun yang penulis lakukan, yang selalu menjadi tempat favorit penulis untuk berkeluh kesah dan menghabiskan waktu.
11. Serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, senang mengenal dan bekerjasama dengan kalian semua. See you on top guys.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini kurang dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang diberikan sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2017

Penulis

RINGKASAN

HASNA NABILA RAHMAN, Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2018, **TINJAUAN YURIDIS PASAL 111 AYAT (1) HURUF C ANGKA (4) REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AGENCY / HEAD OF NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 3 YEAR 1997 REGARDING LAND REGISTRATION**, Moh. Bakri dan M. Hamidi Masykur.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya sistem penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dalam pasal 111 ayat (1) huruf (c) angka 4 Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam pembuatan surat keterangan waris, masih dilakukan pembedaan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah dijelaskan bahwa sistem penggolongan penduduk di Indonesia telah dihapuskan. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk sebagai salah satu syarat dalam hal peralihan hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengutamakan pendekatan perundang-undangan. adapun bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis sinkronisasi vertical.

Berdasarkan penelitian penulis, pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak dapat dibenarkan menurut asas *lex superior derogat legi inferior* dan *asas lex posterior derogat legi prior*. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa rekomendasi mengenai solusi dalam hal pembuatan surat keterangan waris yang masih didasarkan pada penggolongan penduduk berupa dibuatnya surat keterangan waris terpadu oleh notaries yang didaftarkan secara online pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Oleh karena itu, perlunya ditinjau kembali mengenai Peraturan Menteri tersebut dengan melakukan *Judicial Review* di Mahkamah Agung dan diberlakukannya surat keterangan waris terpadu yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan secara online di Kemenkumham.

SUMMARY

HASNA NABILA RAHMAN, Civil Law, at Faculty of Law Brawijaya University, Maret 2018, **JURIDIS REVIEW ARTICLE 111 RULES (1) LETTER C NUMBER (4) REGULATION OF THE STATE MINISTER OF AGRARIAN / HEAD OF STATE AGENCY AGENCY NUMBER 3 YEAR 1997 REGARDING LAND REGISTRATION**, Moh. Bakri dan M. Hamidi Masykur.

In this minor thesis, the author is motivated by the enactment of population classification system in the making of inheritance certificate in article 111 paragraph (1) letter (c) number 4 of Regulation of Minister of ATR / KBPN Number 3 Year 1997 concerning Land Registration where in making of inheritance certificate, authorized in its manufacture. Whereas in Law Number 12 Year 2006 on Citizenship and Law Number 40 Year 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination it has been explained that the system of population classification in Indonesia has been abolished. Therefore, a study of juridical review of Article 111 paragraph 1 letter c number 4 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on Land Registration which regulates the making of inheritance certificate based on the classification of the population as a condition in transition of land rights. This research is a normative law research with emphasis on legislation approach. The primary and secondary law materials of this study were analyzed using vertical sync analysis techniques.

Based on the authors' research, Article 111 paragraph 1 letter c number 4 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 can not be justified according to the principle of superior lex superior derogat legi inferior and lex posterior principle of legi prior derogat. In addition, the authors also provide some recommendations regarding the solution in terms of making a certificate of inheritance that is still based on the classification of residents in the form of a certificate of inheritance integrated by the notaries are registered online at the Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham).

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	I
Halaman Persetujuan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Summary.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Bagan.....	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penggolongan Penduduk.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Waris.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Positif Indonesia.....	27
D. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	33
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	34
F. Definisi Konseptual.....	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia	36
1. Sejarah Masih Diberlakukannya Sistem Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris.....	36
2. Peralihan Hak Waris Atas Tanah	39
3. Penghapusan Penggolongan Penduduk menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	42
3.1 Penghapusan Penggolongan Penduduk menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.....	42
3.1.1 Pengertian Kewarganegaraan.....	42
3.1.2 Perkembangan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan di Indonesia.....	44
3.2 Penghapusan Penggolongan Penduduk menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	48
4. Kedudukan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka (4) Peraturan Menteri Negara	

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas yang Terkandung di dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	52
4.1 Pengertian Undang-Undang.....	52
4.2 Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang-Undangan.....	52
4.3 Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	53
B. Solusi terhadap Surat Keterangan Waris yang Mencerminkan Kepastian Hukum	57
1. Surat Keterangan Waris Terpadu.....	57
1.1. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris	58
1.2. Konflik yang Timbul dalam Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris Berdasarkan Penggolongan Penduduk	65
2. Surat Keterangan Waris Terpadu oleh Notaris.....	66
3. Kekuatan Surat Keterangan Waris yang Dibuat Oleh Notaris.....	67
4. Surat Keterangan Waris Di Daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Secara Online.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
--------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Gambar 1 Bagan Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Camat dan Lurah.....	59
Gambar 2 Bagan Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris.....	60
Gambar 3 Bagan Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Balai Harta Peninggalan.....	64